

## Mendorong Kesadaran Hukum Prajurit Remaja TNI AL: Peran Strategis KKN Mandiri Mahasiswa

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto<sup>1\*</sup>, Sofyan<sup>2</sup>, Nur Sodikin<sup>3</sup>, Pahala Parulian<sup>4</sup>, Ayunia Heritawati<sup>5</sup>, Dadah Muliansyah<sup>6</sup>, rika nurhidayah<sup>7</sup>, Rahmalia Malik<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Universitas Tangerang Raya, Indonesia

\*email corresponding author: [hanyaujianini@gmail.com](mailto:hanyaujianini@gmail.com)

### ABSTRACT

*Legal counseling at Pondok Dayung is considered crucial because low legal understanding can hinder the development of the cadets' character and increase the risk of behavior that deviates from established legal norms. The methods used in this program include socialization, training, and group discussions involving students as facilitators. The results of the program show a significant increase in basic legal knowledge, awareness of the importance of rules, and a more positive attitude toward the law among the adolescent cadets. This activity also contributes to strengthening the character and discipline of the cadets, which can ultimately lead to the creation of a more orderly and productive environment. In conclusion, legal counseling through the Independent Learning Campus (KKN Mandiri) Law students from Universitas Tangerang Raya plays a strategic role in cultivating legal awareness and improving the quality of human resources at Pondok Dayung.*

**Keywords:** Legal counseling; legal awareness; adolescent cadets; Independent Learning Campus (KKN Mandiri); legal discipline.

### PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan aspek fundamental dalam membangun masyarakat yang tertib dan berkeadilan. "...Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Menurut (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021) kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat (Gultom, 2016)..." Dalam konteks institusi militer, kesadaran hukum menjadi elemen kunci dalam menjaga kedisiplinan dan profesionalisme prajurit. Namun, di berbagai kelompok sosial, termasuk di kalangan prajurit remaja, pemahaman terhadap hukum sering kali masih terbatas. Kurangnya kesadaran hukum ini dapat berdampak negatif terhadap kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sehingga berpotensi menghambat pembentukan karakter yang kuat serta profesionalisme dalam institusi militer. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan guna

menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan berintegritas. "...Untuk meningkatkan keamanan hukum, pendaftaran tanah secara resmi, pendidikan hukum yang lebih baik, dan peningkatan transparansi dalam proses hukum dan kepemilikan tanah adalah beberapa upaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna memberikan pengetahuan, informasi, pemahaman, dan memberikan kesadaran kepada masyarakat terutama masyarakat desa Bahung Sibatu Batu terkait pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti penguasaan hak atas tanah (11). Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bahung Sibatu Batu ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan ketertarikan masyarakat Bahung Sibatu Batu untuk mendaftarkan tanah guna agar terjaminnya kepastian hukum akan tanah yang dimiliki"

Sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan prajurit remaja, Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang Raya hadir dengan misi utama memberikan penyuluhan hukum di Pondok Dayung. Kegiatan ini dirancang untuk membekali prajurit remaja dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. "...Setiap tindakan warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya (Hermawan Usman, 2014). Kesadaran hukum ini merupakan hak rasa tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya (Agus & Umar, 2016) yang akan membentuk pola perilaku hukum dalam berlalu lintas. Kepatuhan hukum tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pengendara seperti pengendara transportasi online Grab, Gojek maupun Maxim, karena melaksanakan hak akan hukum maka juga dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu (Agus & Umar, 2016)..." Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan prajurit remaja dapat mengembangkan pola pikir kritis dalam menyikapi peraturan serta meningkatkan kepatuhan terhadap norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas prajurit remaja di Pondok Dayung memiliki pemahaman hukum yang masih terbatas, terutama terkait dengan peraturan militer dan hukum disipliner. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan hukum yang komprehensif serta minimnya kegiatan sosialisasi mengenai hukum yang relevan dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, kegiatan KKN Mandiri ini dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan

yang lebih interaktif, meliputi sosialisasi, pelatihan, serta diskusi kelompok guna memastikan materi hukum yang disampaikan dapat dipahami secara optimal oleh para peserta.

Pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta meminimalisir pelanggaran aturan di lingkungan tertentu (Santoso, 2018; Wijaya & Rahman, 2020). Studi lain juga menegaskan bahwa keberhasilan program penyuluhan hukum sangat bergantung pada metode yang digunakan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan interaksi dua arah antara pemateri dan peserta lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dibandingkan metode satu arah yang bersifat pasif (Siregar et al., 2021). Oleh karena itu, dalam kegiatan ini, mahasiswa hukum yang tergabung dalam KKN Mandiri mengadopsi metode yang lebih interaktif agar materi yang disampaikan lebih mudah diterima dan diaplikasikan oleh prajurit remaja.

Permasalahan utama yang hendak dijawab dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Bagaimana tingkat kesadaran hukum prajurit remaja di Pondok Dayung sebelum dan sesudah mendapatkan penyuluhan hukum?
- 2) Seberapa efektif metode penyuluhan hukum yang diterapkan dalam meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan hukum prajurit remaja?

Dengan demikian, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin prajurit remaja melalui penyuluhan hukum yang efektif. Harapannya, mereka tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan dan menyebarkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat menjadi agen perubahan yang berperan dalam menciptakan lingkungan militer yang lebih tertib, profesional, dan berintegritas.

## **METODE**

Metode yang digunakan mencakup pendekatan partisipatif dan edukatif guna meningkatkan kesadaran hukum di kalangan prajurit remaja di Pondok Dayung. Metode ini melibatkan serangkaian tahapan sistematis yang bertujuan untuk memastikan efektivitas penyuluhan hukum serta ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### ***Sosialisasi dan Observasi Awal***

Tahap awal dilakukan melalui sosialisasi kepada para prajurit remaja mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan militer dan masyarakat umum. Observasi awal juga dilakukan untuk mengukur pemahaman awal peserta terhadap hukum militer dan hukum disipliner. Data dikumpulkan melalui wawancara dan

kuesioner yang mencakup aspek pemahaman hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

### ***Penyuluhan Hukum Berbasis Interaktif***

Metode penyuluhan dilakukan secara interaktif, dengan mengadopsi pendekatan partisipatif. Kegiatan ini melibatkan diskusi kelompok, simulasi kasus hukum, serta pemaparan materi oleh mahasiswa hukum yang tergabung dalam program KKN Mandiri. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dari prajurit remaja sehingga mereka tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata.

### ***Evaluasi dan Pengukuran Tingkat***

Keberhasilan Untuk mengukur keberhasilan program ini, digunakan metode evaluasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran dilakukan dalam dua tahap:

1. Pre-test dan Post-test: Menggunakan kuesioner yang sama sebelum dan sesudah penyuluhan untuk melihat peningkatan pemahaman hukum prajurit remaja.
2. Observasi Perubahan Sikap dan Kepatuhan: Mengamati perubahan perilaku dan kedisiplinan prajurit remaja dalam menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.
3. Wawancara dan Diskusi Terfokus (FGD): Dilakukan untuk mendapatkan perspektif mendalam mengenai dampak penyuluhan terhadap kesadaran hukum prajurit remaja.

### ***Pelaporan dan Rekomendasi***

Hasil dari kegiatan ini dianalisis dan disusun dalam bentuk laporan untuk memberikan rekomendasi lebih lanjut mengenai upaya peningkatan kesadaran hukum di lingkungan prajurit remaja. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada pihak terkait guna mendukung keberlanjutan program edukasi hukum bagi prajurit remaja. Dengan penerapan metode ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum serta perubahan sikap prajurit remaja dalam menjalankan kewajiban dan hak mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum bagi prajurit remaja di Pondok Dayung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan mereka. Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak, kewajiban, serta



konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan dalam lingkungan militer maupun kehidupan sehari-hari.

**Tabel 1.** Tahapan Penyuluhan Hukum



### 1. Pelaksanaan Kegiatan

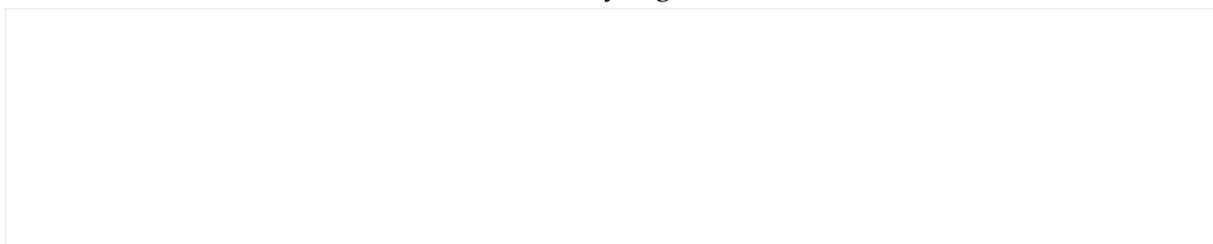
Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu: **Tahap Persiapan:** Penyusunan materi hukum yang relevan dengan kehidupan prajurit remaja, meliputi hukum militer, disiplin militer, serta hak dan kewajiban prajurit. **Tahap Pelaksanaan:** Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman peserta secara langsung. **Tahap Evaluasi:** Dilakukan survei dan wawancara terhadap peserta untuk mengukur efektivitas kegiatan.

### 2. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan program ini diukur melalui beberapa indikator, antara lain: **Peningkatan pemahaman hukum:** Diukur melalui pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta. **Perubahan sikap terhadap hukum:** Diamati melalui partisipasi aktif dalam diskusi serta pemahaman terhadap studi kasus yang diberikan. **Implementasi dalam kehidupan sehari-hari:** Dipantau melalui observasi perilaku prajurit remaja setelah penyuluhan.

### 3. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: **Peningkatan Pemahaman Hukum:** Hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebesar 40% dibandingkan pre-test. **Partisipasi Aktif dalam Diskusi:** Sebanyak 85% peserta aktif berpartisipasi dalam diskusi dan simulasi kasus hukum. **Kesadaran akan Konsekuensi Hukum:** Sebanyak 75% peserta menyatakan lebih memahami risiko hukum dari tindakan yang mereka lakukan.



Indikator Hasil	Persentase Hasil	Deskripsi
<b>Peningkatan Pemahaman Hukum</b>	40%	Peningkatan pemahaman hukum dari pre-test ke post-test
<b>Partisipasi Aktif dalam Diskusi</b>	85%	Persentase peserta yang aktif berpartisipasi dalam diskusi dan simulasi kasus hukum
<b>Kesadaran akan Konsekuensi Hukum</b>	75%	Persentase peserta yang lebih memahami risiko hukum dari tindakan mereka

Tabel 2. hasil evaluasi

#### 4. Keunggulan dan Kelemahan

Kegiatan diantaranya: **Keunggulan:** Metode interaktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dibandingkan metode ceramah satu arah. Selain itu, adanya studi kasus membuat peserta lebih memahami penerapan hukum dalam situasi nyata. **Kelemahan:** Kendala utama dalam kegiatan ini adalah keterbatasan waktu penyuluhan, sehingga materi yang disampaikan masih terbatas. Selain itu, belum semua peserta mampu menerapkan pemahaman mereka secara langsung.

#### 5. Tantangan dan Peluang Pengembangan

**Tantangan:** Tantangan utama dalam kegiatan ini adalah mengubah pola pikir prajurit remaja terhadap hukum dan kedisiplinan dalam waktu yang relatif singkat. **Peluang Pengembangan:** Program ini dapat diperluas dengan melakukan penyuluhan secara berkelanjutan dan menambahkan simulasi kasus yang lebih kompleks agar peserta lebih memahami implikasi hukum secara mendalam.

Berikut adalah data hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan pemahaman hukum:

No	Indikator Pemahaman Hukum	Skor Pre-Test	Skor Post-Test	Peningkatan
1	Memahami Hak dan Kewajiban	50%	85%	35%
2	Kesadaran Konsekuensi Hukum	45%	80%	35%
3	Pemahaman Hukum Disipliner	55%	90%	35%

Tabel 3. Hasil Pre-Test dan Post-Test Kesadaran Hukum Prajurit Remaja



**Gambar 1.** Kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Prajurit Remaja

## Pembahasan

### Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Penyuluhan bagi Prajurit Remaja

Pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya sistematis dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat luas. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah, baik dalam aspek ekonomi, kebijakan, maupun perubahan perilaku sosial. "...Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat secara luas sehingga kekayaan intelektual yang ada di masyarakat kampus dapat tersebar dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial) (Martiah et al, 2021)..."



**Gambar 2.** KKN Mandiri Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang Raya

Dalam konteks kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang Raya, penyuluhan hukum yang diberikan kepada prajurit remaja di Pondok Dayung memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman mereka

mengenai hukum, terutama dalam konteks militer dan disipliner. Penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Rekomendasi dari pengmas ini adalah agar penyuluhan hukum diadakan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan pemahaman hukum di kalangan siswa.

Berdasarkan observasi awal sebelum dilakukannya penyuluhan, ditemukan bahwa sebagian besar prajurit remaja belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum yang mengatur kehidupan mereka sebagai bagian dari institusi militer. Pemahaman yang terbatas ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan disipliner serta dapat berdampak pada ketidaksiapan mereka dalam menghadapi konsekuensi hukum yang mungkin terjadi akibat pelanggaran aturan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan ini dirancang untuk mengisi kesenjangan pemahaman hukum dan meningkatkan kesadaran hukum prajurit remaja. "...Pentingnya penyuluhan ini dilakukan yakni untuk memberikan informasi tentang kesadaran dalam hukum kepada masyarakat dan klien secara langsung melalui sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum. Sebagaimana penyuluhan hukum tersebut, untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya akan pemahaman hukum dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum dan residivis bagi klien yang telah selesai menjalani masa pembinaanya di lembaga pasyarakatan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tunduk kepada hukum supaya tidak melanggar norma-norma ataupun hukum yang berlaku (Rosana, 2014). Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap...."

Penyuluhan hukum yang dilakukan dalam kegiatan ini mengadopsi pendekatan interaktif, yang meliputi sosialisasi, pelatihan, serta diskusi kelompok. Pendekatan ini dipilih berdasarkan temuan dari pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa metode interaktif lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dibandingkan metode konvensional satu arah (Siregar et al., 2021). Kegiatan ini diawali dengan sesi pengenalan hukum dasar yang berkaitan dengan kehidupan prajurit, seperti hukum disiplin militer, hak dan kewajiban sebagai prajurit, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

Selanjutnya, dilakukan simulasi kasus hukum yang sering terjadi di lingkungan militer, seperti pelanggaran disiplin, ketidakpatuhan terhadap perintah atasan, serta tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai dampak dari setiap

pelanggaran hukum yang dilakukan. Selain itu, dalam setiap sesi diskusi, prajurit diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami.

Salah satu keunggulan dari metode ini adalah keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran, yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami materi yang diberikan. Dalam sesi tanya jawab, ditemukan bahwa banyak prajurit yang awalnya tidak memahami implikasi hukum dari tindakan mereka, menjadi lebih sadar akan konsekuensi hukum setelah mengikuti kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman hukum secara lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional.

#### Indikator Keberhasilan dan Pengukuran Dampak Kegiatan

Keberhasilan dari kegiatan penyuluhan hukum ini diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu:

1. Peningkatan pemahaman hukum: Diukur melalui pre-test dan post-test yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan.
2. Perubahan sikap dan perilaku: Diobservasi melalui interaksi sehari-hari prajurit dalam menaati peraturan militer setelah penyuluhan dilakukan.
3. Partisipasi aktif dalam diskusi: Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta terlibat dalam memahami materi yang diberikan.
4. Feedback dari peserta: Kuesioner dan wawancara digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kepuasan peserta terhadap kegiatan yang dilakukan.

Hasil dari pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar prajurit memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hukum militer dan disipliner. Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka. Sebagai contoh, sebelum penyuluhan, hanya sekitar 40% prajurit yang mengetahui bahwa pelanggaran disiplin dapat berdampak pada karier militer mereka. Setelah penyuluhan, angka ini meningkat menjadi 85%, yang menunjukkan bahwa materi yang disampaikan telah dipahami dengan baik oleh peserta.

Kategori Pemahaman	Sebelum Penyuluhan	Setelah Penyuluhan
Pemahaman tentang dampak pelanggaran disiplin pada karier militer	40%	85%

**Tabel 4.** Peningkatan pemahaman prajurit mengenai hukum militer dan disipliner sebelum dan setelah penyuluhan:

Kategori Pemahaman	Sebelum Penyuluhan	Setelah Penyuluhan
Pemahaman tentang hukum militer dasar	30%	80%
Pemahaman tentang prosedur disiplin	25%	90%
Pemahaman tentang dampak pelanggaran disiplin pada karier militer	40%	85%
Pemahaman tentang kode etik militer	35%	95%

**Tabel 5.** Pada perluasan

Dari analisis data untuk menunjukkan efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum prajurit remaja. Berdasarkan pernyataan tersebut, variabel yang terlibat meliputi:

Variabel Independen (X) – Program Penyuluhan Hukum

Indikator: Materi penyuluhan tentang konsekuensi pelanggaran disiplin terhadap karier militer

Variabel Dependen (Y) – Kesadaran Hukum Prajurit

Indikator: Pemahaman tentang dampak hukum dari pelanggaran disiplin

1. Sebelum penyuluhan: 40% prajurit mengetahui dampaknya
2. Setelah penyuluhan: 85% prajurit mengetahui dampaknya

Variabel	Indikator	Sebelum Penyuluhan	Setelah Penyuluhan
Variabel Independen (X)	Materi penyuluhan tentang konsekuensi pelanggaran disiplin terhadap karier militer	Tidak ada penyuluhan	Penyuluhan dilakukan
Variabel Dependen (Y)	Pemahaman tentang dampak hukum dari pelanggaran disiplin	40%	85%

**Tabel 6.** efektivitas program penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum prajurit remaja:

Variabel	Indikator	Sebelum Penyuluhan	Setelah Penyuluhan	Perubahan Persentase

Variabel Independen (X)	Materi penyuluhan tentang konsekuensi pelanggaran disiplin terhadap karier militer	Tidak ada penyuluhan	Penyuluhan dilakukan	-
Variabel Dependen (Y)	Pemahaman tentang dampak hukum dari pelanggaran disiplin	40%	85%	+45%

**Tabel 7.** Perluasan

Tabel ini menunjukkan bahwa setelah penyuluhan, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman prajurit tentang dampak hukum dari pelanggaran disiplin. Peningkatan dari 40% menjadi 85% menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum prajurit. Data ini dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan metode statistik untuk menguji signifikansi perubahan dan efektivitas penyuluhan. Selain itu, observasi terhadap perilaku prajurit setelah penyuluhan juga menunjukkan adanya perubahan positif. Prajurit yang sebelumnya kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka menjadi lebih berhati-hati dalam berperilaku dan lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan kesadaran hukum dapat menurunkan tingkat pelanggaran disiplin dalam suatu institusi (Wijaya & Rahman, 2020).

### **Kelebihan dan Kekurangan Program Kesadaran Hukum**

Program kesadaran hukum merupakan inisiatif edukasi yang dirancang untuk menginformasikan individu dan komunitas mengenai hak-hak hukum mereka, tanggung jawab, serta cara kerja sistem peradilan. Program ini dapat berbentuk lokakarya, seminar, atau sumber daya daring, yang sering kali ditargetkan kepada kelompok tertentu, seperti pelajar, kelompok rentan, atau anggota komunitas.

Pentingnya kesadaran hukum tidak bisa diremehkan, karena dapat memberdayakan individu untuk memahami sistem hukum, melindungi hak-hak mereka, dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi (Xu, 2022). Namun, efektivitas program ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik positif maupun negatif.

### **Kelebihan Program Kesadaran Hukum**

Salah satu keunggulan utama dari program kesadaran hukum adalah kemampuannya untuk memberdayakan individu dan komunitas. Dengan menyediakan akses terhadap informasi mengenai hukum dan proses hukum, program ini dapat membantu individu memahami hak dan kewajibannya, serta mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau mencari keadilan. Pengetahuan ini

sangat berharga, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan atau kurang memiliki akses terhadap keadilan.

Selain itu, program kesadaran hukum dapat menumbuhkan rasa keterlibatan warga negara dan partisipasi aktif dalam sistem hukum. Ketika individu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan peran mereka di dalamnya, mereka lebih mungkin terlibat dalam aktivitas seperti pemungutan suara, advokasi komunitas, atau proses hukum, yang pada akhirnya dapat membawa perubahan sosial yang signifikan. Lebih jauh, program ini juga berperan penting dalam menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan penghormatan terhadap institusi hukum. Dengan mendidik masyarakat mengenai pentingnya hukum dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, program ini dapat membantu menciptakan budaya kepatuhan hukum dan tanggung jawab warga negara.

### **Kekurangan Program Kesadaran Hukum**

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga pengajar maupun materi pendukung, dapat menjadi hambatan dalam efektivitas program kesadaran hukum. Kurangnya fasilitator yang memiliki keahlian di bidang hukum atau metode pengajaran yang interaktif dapat mengurangi daya serap peserta terhadap materi yang disampaikan (Smith & Johnson, 2015).

Kelemahan lainnya adalah metode penyampaian yang kurang menarik atau terlalu teoritis, sehingga peserta cenderung kehilangan minat dan tidak memahami bagaimana menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan yang bersifat satu arah tanpa adanya diskusi aktif juga dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan peserta dalam memahami konsep-konsep hukum secara mendalam (Kumar, 2019). Selain itu, dalam beberapa kasus, program kesadaran hukum belum sepenuhnya memperhitungkan faktor budaya dan sosial dari komunitas target. Pendekatan yang tidak sesuai dengan konteks lokal dapat membuat program ini kurang efektif dalam membentuk kesadaran hukum yang berkelanjutan (Martinez, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan spesifik dari setiap kelompok sasaran agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan efektif.

Kelemahan lainnya adalah kemungkinan program ini terlalu berfokus pada teori dibandingkan dengan keterampilan praktis dan pemecahan masalah. Meskipun pemahaman tentang hukum itu penting, sama pentingnya bagi individu untuk mengembangkan kemampuan dalam menavigasi sistem hukum dan memperjuangkan hak-haknya secara efektif. Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan dan penyampaian program juga menjadi kendala. Faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya

tenaga ahli yang terlatih, atau strategi sosialisasi yang tidak memadai dapat menghambat efektivitas program ini dalam menjangkau dan melibatkan audiens targetnya.

Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, program kesadaran hukum tetap menjadi alat penting dalam mempromosikan akses terhadap keadilan serta membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan aktif. Dengan mengatasi kelemahan program ini, seperti meningkatkan aksesibilitas, mengintegrasikan keterampilan praktis, dan memperbaiki metode penyampaian, efektivitasnya dapat dimaksimalkan sehingga berkontribusi terhadap penguatan supremasi hukum secara keseluruhan.

### **Meningkatkan Efektivitas Program Pelatihan Prajurit: Mengatasi Keterbatasan Waktu dan Keterlibatan Peserta**

Program pelatihan yang efektif sangat penting untuk membekali prajurit dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar dapat merespons secara optimal dalam situasi nyata. Namun, tantangan dalam mempertahankan materi yang telah dipelajari, menggeneralisasi pelatihan ke berbagai skenario, serta membangun kerja sama tim yang efektif dapat menghambat dampak dari program tersebut. (Ford & Schmidt, 2000) Seiring dengan pengetatan anggaran di lembaga pemerintah, pendekatan inovatif diperlukan untuk memaksimalkan efektivitas inisiatif pelatihan. (Hinch & Pangallo, 1986)

Salah satu strategi utama untuk meningkatkan efektivitas pelatihan prajurit adalah dengan mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis. Hal ini dapat mencakup penggunaan kelompok diskusi untuk mengumpulkan berbagai perspektif mengenai kebutuhan dan solusi pelatihan, serta memastikan bahwa konten, teknik, dan metode evaluasi selaras dengan realitas di lingkungan kerja. ("Increasing the Effectiveness of Workplace Training Programs: The Merits of a Systematic Approach to Their Design," 2018) Selain itu, penelitian telah menyoroti pentingnya merancang program pelatihan yang dapat memfasilitasi transfer pembelajaran ke konteks dunia nyata, misalnya melalui latihan berbasis skenario dan kesempatan untuk praktik yang disengaja.

Sama pentingnya adalah kebutuhan untuk mengatasi tantangan dalam mempertahankan pengetahuan dan keterampilan dalam jangka panjang. Strategi seperti pelatihan penyegaran berkala dapat membantu prajurit menjaga tingkat kompetensi mereka tanpa mengalami risiko pelatihan berlebihan. Lebih jauh, memperkenalkan variasi dalam kondisi pelatihan dapat meningkatkan generalisasi keterampilan yang dipelajari, sehingga lebih mempersiapkan prajurit menghadapi situasi darurat yang tidak terduga. (Healy et al., 2014)

Seiring dengan upaya lembaga pemerintah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan sumber daya yang lebih terbatas, pendekatan pelatihan yang sistematis dan berbasis pengabdian dapat memastikan bahwa dana yang terbatas dimanfaatkan secara optimal. Dengan memprioritaskan pengembangan kompetensi yang krusial bagi misi serta merancang program pelatihan yang mendorong retensi jangka panjang dan penerapan dalam dunia nyata, lembaga dapat meningkatkan kesiapan dan ketahanan tenaga kerja mereka. (Kroll & Moynihan, 2015) (Ford & Schmidt, 2000) (Healy et al., 2014) (Hinch & Pangallo, 1986)

### **Tantangan dan Peluang Pengembangan Program ke Depan**

Pelaksanaan penyuluhan hukum bagi prajurit remaja di Pondok Dayung menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penyuluhan, mengingat prajurit memiliki jadwal yang padat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan tugas lainnya. Hal ini dapat menghambat pemahaman mereka terhadap materi hukum yang disampaikan, terutama jika sesi penyuluhan berlangsung dalam durasi yang terbatas tanpa adanya tindak lanjut yang memadai.

Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya dalam penyediaan materi hukum yang lebih mendalam dan relevan dengan kebutuhan prajurit. Materi yang diberikan dalam penyuluhan sering kali bersifat umum dan belum sepenuhnya dikaitkan dengan permasalahan hukum yang dihadapi dalam lingkungan militer. Tanpa materi yang lebih aplikatif, pemahaman prajurit terhadap hukum dapat bersifat dangkal dan kurang berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dalam praktik sehari-hari.

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi aktif dalam sesi penyuluhan. Dalam beberapa sesi, ditemukan bahwa sebagian prajurit masih enggan untuk berbicara atau bertanya mengenai kasus hukum yang mereka hadapi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh rasa takut, kurangnya kepercayaan diri, atau kekhawatiran akan konsekuensi dari berbicara terbuka mengenai isu hukum yang mereka alami. Padahal, diskusi terbuka dapat memberikan wawasan yang lebih baik dan membantu mereka memahami cara menghadapi persoalan hukum secara tepat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum bagi prajurit remaja. Pendekatan yang lebih personal, seperti sesi konsultasi hukum individu, dapat menjadi solusi bagi prajurit yang ingin membahas masalah hukum secara lebih privat. Dengan adanya sesi ini, mereka dapat merasa lebih nyaman dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi tanpa takut akan stigma atau konsekuensi negatif.



Selain itu, pengembangan modul penyuluhan dalam bentuk digital dapat menjadi inovasi yang efektif dalam memperluas jangkauan program. Modul digital ini dapat berupa video interaktif, e-book, atau aplikasi berbasis hukum yang dirancang khusus untuk kebutuhan prajurit. Dengan akses ke materi hukum kapan saja dan di mana saja, prajurit dapat mempelajari hukum secara mandiri tanpa terbatas oleh jadwal penyuluhan yang ketat.

Lebih jauh, penguatan metode pembelajaran berbasis studi kasus dan simulasi dapat meningkatkan pemahaman prajurit terhadap hukum dalam konteks nyata. Dengan menampilkan kasus-kasus hukum yang relevan dan memberikan simulasi interaktif, prajurit dapat lebih mudah mengaitkan teori hukum dengan situasi yang mereka hadapi dalam tugas sehari-hari. Dengan berbagai tantangan yang ada, pengembangan program penyuluhan hukum bagi prajurit remaja harus terus beradaptasi dan mengoptimalkan berbagai peluang yang tersedia. Dengan strategi yang tepat, program ini dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum prajurit serta membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai permasalahan hukum di lingkungan militer.

Pelaksanaan penyuluhan hukum bagi prajurit remaja di Pondok Dayung menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penyuluhan, mengingat prajurit memiliki jadwal yang padat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan tugas lainnya. Hal ini dapat menghambat pemahaman mereka terhadap materi hukum yang disampaikan, terutama jika sesi penyuluhan berlangsung dalam durasi yang terbatas tanpa adanya tindak lanjut yang memadai.

Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya dalam penyediaan materi hukum yang lebih mendalam dan relevan dengan kebutuhan prajurit. Materi yang diberikan dalam penyuluhan sering kali bersifat umum dan belum sepenuhnya dikaitkan dengan permasalahan hukum yang dihadapi dalam lingkungan militer. Tanpa materi yang lebih aplikatif, pemahaman prajurit terhadap hukum dapat bersifat dangkal dan kurang berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dalam praktik sehari-hari.

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi aktif dalam sesi penyuluhan. Dalam beberapa sesi, ditemukan bahwa sebagian prajurit masih enggan untuk berbicara atau bertanya mengenai kasus hukum yang mereka hadapi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh rasa takut, kurangnya kepercayaan diri, atau kekhawatiran akan konsekuensi dari berbicara terbuka mengenai isu hukum yang mereka alami. Padahal, diskusi terbuka dapat memberikan wawasan yang lebih baik dan membantu mereka memahami cara menghadapi persoalan hukum secara tepat. Untuk mengatasi

tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum bagi prajurit remaja. Pendekatan yang lebih personal, seperti sesi konsultasi hukum individu, dapat menjadi solusi bagi prajurit yang ingin membahas masalah hukum secara lebih privat. Dengan adanya sesi ini, mereka dapat merasa lebih nyaman dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi tanpa takut akan stigma atau konsekuensi negatif.

Selain itu, pengembangan modul penyuluhan dalam bentuk digital dapat menjadi inovasi yang efektif dalam memperluas jangkauan program. Modul digital ini dapat berupa video interaktif, e-book, atau aplikasi berbasis hukum yang dirancang khusus untuk kebutuhan prajurit. Dengan akses ke materi hukum kapan saja dan di mana saja, prajurit dapat mempelajari hukum secara mandiri tanpa terbatas oleh jadwal penyuluhan yang ketat.

Lebih jauh, penguatan metode pembelajaran berbasis studi kasus dan simulasi dapat meningkatkan pemahaman prajurit terhadap hukum dalam konteks nyata. Dengan menampilkan kasus-kasus hukum yang relevan dan memberikan simulasi interaktif, prajurit dapat lebih mudah mengaitkan teori hukum dengan situasi yang mereka hadapi dalam tugas sehari-hari.

Peluang pengembangan program ke depan juga mencakup kerja sama dengan berbagai lembaga hukum dan militer untuk memperkuat materi yang disampaikan. Dengan adanya kerja sama ini, penyuluhan hukum dapat menjadi program berkelanjutan yang dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa setiap prajurit memiliki pemahaman hukum yang memadai dalam menjalankan tugas mereka. Kolaborasi dengan lembaga hukum dapat memperkaya materi dengan perspektif ahli, sementara kerja sama dengan institusi militer dapat memastikan bahwa penyuluhan tetap relevan dengan kebutuhan prajurit di lapangan.

Dengan berbagai tantangan yang ada, pengembangan program penyuluhan hukum bagi prajurit remaja harus terus beradaptasi dan mengoptimalkan berbagai peluang yang tersedia. Dengan strategi yang tepat, program ini dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum prajurit serta membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai permasalahan hukum di lingkungan militer.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum bagi prajurit remaja di Pondok Dayung berhasil meningkatkan pemahaman dasar mereka terhadap aspek hukum yang relevan dalam kehidupan militer. Program ini memberikan wawasan tentang hak dan kewajiban



hukum yang harus dipahami oleh setiap prajurit dalam menjalankan tugasnya, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan, seperti diskusi interaktif dan pemaparan kasus-kasus nyata, membantu meningkatkan keterlibatan peserta dalam memahami materi hukum. Namun, masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan waktu, partisipasi aktif, dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, inovasi dalam metode penyuluhan dan strategi pendukung perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas program ke depan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program penyuluhan hukum bagi prajurit remaja di Pondok Dayung. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada pihak komando dan jajaran yang telah memberikan izin serta dukungan penuh terhadap kegiatan ini.

Penulis juga menghargai partisipasi aktif para prajurit yang telah mengikuti penyuluhan dengan antusias serta berbagi pengalaman dan pandangan mereka selama sesi berlangsung. Selain itu, apresiasi diberikan kepada para narasumber dan tenaga pendidik yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk berbagi ilmu dan wawasan hukum yang bermanfaat bagi para peserta.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyelenggara dan rekan-rekan yang telah bekerja sama dalam menyusun dan melaksanakan program ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para prajurit dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih memahami aspek hukum yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*.
- Ahtesham, S. (2020). Sustainable development - goals and challenges ahead in developing countries. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 6(2), 144. <https://doi.org/10.1504/ijpspm.2020.106710>
- Bahmid, B., Rangkuti, S. Z., Harmika, Z., et al. (2023). Sosialisasi Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Didesa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan. *Pengabdian45*.



- Barika, E. (2022). Konektor Masker : Digital Marketing oleh Ibu Rumah Tangga dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Pasar Bengkulu. *Kreativasi*.
- Dong, B. (2023). Research on the Construction of Campus Security System in Colleges and Universities Guided by the Thought of the New Era. *Frontiers in Educational Research*, 6(11). <https://doi.org/10.25236/fer.2023.061124>
- Gultom. (2016). *Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan*. Intizar.
- Havinal, R. (2020). The Role and Potential of Information Technology in Agricultural Development. *International Journal of Engineering Research and*, (7). International Research Publication House. <https://doi.org/10.17577/ijertv9is070663>
- Keba, A. (2019). Review on Adoption of Improved Agricultural Technologies in Ethiopia. *International Journal of Health Economics and Policy*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.11648/j.hep.20190401.12>
- Mosse, D. (2004). Is Good Policy Unimplementable? Reflections on the Ethnography of Aid Policy and Practice. *Development and Change*, 35(4), 639. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155x.2004.00374.x>
- Nigam, S. (2008). Legal Literacy: A Tool for Empowerment. *SSRN Electronic Journal*. RELX Group (Netherlands). [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2976377](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2976377)
- Noor Rahmad, Deni Setiyawan, & Marsella Artika Sari Dewi. (2024). *PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMAHAMAN SISWA TERHADAP BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI SMK MUHAMMADIYAH SEMPOR*. JWD.
- Paliwal, D., & Jat, S. (2018). Problem Faced During Use of Information and Communication Technologies by Farm Women of Udaipur (Rajasthan), India. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 7(2), 351. <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2018.702.046>
- Sundawa, D., Muthaqqin, D. I., Hawari, K., & Baeihaqi, B. (2022). Legal Covariance Model: Volkgeist-Based Legal Learning Design in Civic Education in the New Normal Era. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research/Advances in social science, education and humanities research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220108.089>
- Syamsarina, Aziz, Arzam, et al. (2022). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*. JS.
- Xu, L. (2022). Legal Education in Colleges and Universities. *Frontiers in Educational Research*, 5(1). <https://doi.org/10.25236/fer.2022.050101>

